

SINERGI PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH UNTUK INDONESIA MAJU

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat di daerah. Salah satu strategi yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui berbagai macam program yang dilakukan serta digitalisasi produk dan layanan keuangan. Peran TPAKD di masa pandemi dalam memperluas akses keuangan sangat penting dan menjadi prioritas OJK. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan dan permodalan. Selain itu, dengan mendayagunakan digitalisasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai pelosok daerah dengan mudah, cepat, dan transparan.



“Penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan harus dilakukan secara agresif melalui pendirian Jamkrida, LKM, Agen Bank di setiap desa serta percepatan penerbitan obligasi daerah

Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

OJK mengajak semua pihak berkolaborasi menciptakan berbagai terobosan inovatif untuk memperluas akses keuangan dan mewujudkan sektor jasa keuangan yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif

Wimboh Santoso
Ketua Dewan Komisiner OJK



1. SINERGI TPAKD PUSAT DAN DAERAH

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dibentuk sebagai bentuk sinergi OJK dan pemangku kepentingan di daerah mendorong perluasan akses keuangan sehingga mendukung pengembangan sektor unggulan dan prioritas di daerah. Optimalisasi peran TPAKD meningkatkan inklusi keuangan dilakukan dengan pelaksanaan berbagai program TPAKD dan sinergi TPAKD Pusat dengan daerah agar implementasi program kerja TPAKD dapat lebih optimal dan terarah melalui:



Keberhasilan Implementasi program kerja TPAKD tidak lepas dari dukungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah (Pemda), DPRD dan pemangku kepentingan lainnya melalui:

- Dukungan APBD sesuai Permendagri No 64/2020 diamanahkan Pemda untuk menganggarkan kegiatan untuk mendorong pembentukan dan pelaksanaan program kerja TPAKD dalam APBD
- Penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan fokus yang ditetapkan pada Roadmap TPAKD 2021-2025

2. DIGITALISASI PRODUK DAN LAYANAN KEUANGAN



Bank Wakaf Mikro (LKM Syariah)
Strategi Digitalisasi yang dilakukan oleh BWM dalam memperluas akses keuangan di masa Pandemi dilakukan melalui:

- Digitalisasi Pembiayaan
- Digitalisasi Operasional
- Digitalisasi Pengembangan Usaha Nasabah

Total Pembiayaan
Rp53M

Jumlah Nasabah
37,4ribu



UMKM-MU
Platform *Marketplace* yang difasilitasi OJK untuk memfasilitasi UMKM dalam memperluas jaringan pemasarannya secara digital dan dapat mengakses layanan keuangan melalui platform. Sampai saat ini, terdapat 862 pelaku UMKM yang terdaftar dan lebih dari 1.324 produk yang dipasarkan

Website & Mobile
<https://umkmmu.id/>



Aplikasi KUR Bali.com

- Pengajuan KUR oleh masyarakat secara *Online*
- Monitoring penyaluran KUR di daerah



3. PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN

Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir



Nilai Penyaluran Kredit
Rp587,5M
Jumlah Debitur
47,8 ribu

Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)



55,7 juta Pelajar

Jumlah Rekening
33,92 juta rekening
Nominal Saldo
Rp21,36T

Program JARING



Total kredit
Rp34,96T
(↑9,69% yoy)

Simpanan Pelajar



Nominal Saldo **Rp5,43T**
Jumlah Rekening **25,7** Juta

Laku Pandai



Nominal Saldo **Rp11,45T**
Jumlah Nasabah **36,79** Juta

Kredit Usaha Rakyat



Total Penyaluran Kredit
Rp151,73T

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)



Jumlah Peternak **36.137**
Nilai premi **Rp15,56M**

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)



Nilai Premi **Rp141,51M**.
Realisasi klaim **Rp95,42M**

BUM-Desa Center



29 BUMdes Center di berbagai daerah